

PERAN PEMERINTAH TERHADAP BUDAYA LOKAL DALAM PERKEMBANGAN PARIWISATA (Studi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

Jeminson Umbu Robaka, Willy Tri Hardianto, Eri Yusnita Arianti

Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Jeminson Umbu Robaka

Abstract

The Government's Role in Local Culture in Tourism Development. There is still a shortage of local cultural heritage objects. Data collection and determination of cultural heritage objects in the region is very important to maintain the existence and authenticity of a historical heritage site. Such as low destination management and low budgets and one of the shortcomings, such as at the Candy Singosari site, is that parking space and entrepreneurship are still minimal, while at Sumberawan Temple there is still a lack of road facilities in the tourism area. Regarding such conditions, the Malang Regency government needs to be serious in improving local cultural heritage facilities so that visitors who come feel comfortable and can enjoy the existing cultural heritage, this is a very good potential to develop and also maintain historical and historical values and increase income both Malang Regency government or the local community. The aim of this research is to explain the role of government in local culture in tourism development. This research method uses a qualitative research method because local culture is still very diverse, so based on this type of research the researcher tries to provide in-depth information regarding the Government's Role in Local Culture in Tourism Development. The results of this research are that as a regional government coordinator, you can determine policies or strategies for regional development and embrace all components of society to become the main actor in development. Includes the role of government as coordinator and associations in the tourism sector as tourism organizers, both at local, regional and international levels. According to Law No. 32 of 2004, what is meant by regional government is the administration of government affairs by the local government and DPRD according to the principle of autonomy and assistance duties with the principle of the widest possible autonomy within the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in the State Constitution. Republic of Indonesia in 1945.

Keywords: Local Culture, Tourism, Government Role

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan baik dari sumber daya alam, budaya, dan keanekaragaman adat istiadatnya. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan industri pariwisata. Menurut Nizar (2011), pariwisata sudah berkembang sebagai salah satu industri terbesar di dunia, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah kunjungan wisatawan dan pertumbuhan pendapatan konsumsi wisatawan.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menyumbang pendapatan asli daerah dan mempunyai potensi untuk dikembangkan. Adanya program pengembangan serta pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata akan memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi dan berdampak pada peningkatan pendapatan di daerah tersebut. Menurut Undang-undang

Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kegiatan pariwisata ditujukan untuk menaikkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan dalam usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan wilayah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek serta daya tarik wisata di Indonesia dan menumpuk rasa cinta tanah air dan mempererat hubungan antar bangsa.

Dengan segala keindahan alam serta keunikan yang dimiliki Indonesia, hal ini menarik perhatian dunia. Bahkan menurut Forbes (2022) Indonesia menjadi negara terindah di dunia dengan posisi paling teratas. Survei ini membuktikan bahwa sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

Kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari naiknya pertumbuhan ekonomi dapat ditempuh melalui pembangunan ekonomi pada setiap daerah. Hal itu dapat dilihat dari pendapatan masyarakat sebagai balas jasa bagi faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) dan kesempatan kerja (Fauziah, 2011). Dengan meratanya tingkat pendapatan dan terserapnya penduduk dalam kesempatan kerja, maka pengangguran dan kemiskinan akan berkurang sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pariwisata dapat sebagai suatu perjalanan dari satu tempat menuju tempat lain yang bersifat sementara, yang biasanya dilakukan orang-orang yang ingin menyegarkan pikiran setelah bekerja terus dan memanfaatkan waktu libur dengan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berekreasi. Alasan seseorang berwisata diantaranya dikarenakan adanya dorongan keagamaan seperti berekreasi ke tempat-tempat suci agama untuk mendalami ilmu tentang agama dan ada juga yang bertujuan untuk berolahraga atau sekedar menonton pertandingan olahraga (Spillane, 1993).

Industri pariwisata apabila ditinjau dari segi budaya, secara tidak langsung memberikan peran penting bagi perkembangan budaya Indonesia karena dengan adanya suatu objek wisata maka dapat memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki suatu negara seperti kesenian tradisional, upacara-upacara agama atau adat yang menarik perhatian wisatawan asing dan wisatawan Indonesia. Industri pariwisata yang berkembang dengan pesat memberikan pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung wisata (turis) dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Hal tersebut menjadikan para wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat dan juga memahami latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut (Spillane, 1994).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur 2010-2029 dalam rencana pola ruang wilayah, kawasan cagar budaya yang diperuntukan sebagai cagar budaya bersejarah yang harus dilestarikan termasuk Candi Singosari di Kabupaten Malang, dengan arahan pengelolaannya sebagai pengembangan pencarian situs bersejarah, peningkatan pelestarian situs, candi dan artifak lain yang merupakan peninggalan sejarah serta pengembangan kawasan sebagai obyek daya tarik wisata sejarah. Adanya Candi Singosari, Candi Sumberawan dan pemandian ken dedes pada kawasan cagar budaya Singosari, maka besar potensi yang dapat dikembangkan untuk mengakomodasi wisata cagar budaya tersebut, sehingga perlu adanya peningkatan daya tarik wisata yang menjadikan identitas dari Kabupaten Malang. Melestarikan kawasan cagar budaya Singosari merupakan usaha agar bangunan tersebut dapat dijadikan tujuan wisata cagar budaya (*heritage tourism*). Melihat adanya potensi wisata budaya yang dimiliki daerah tersebut serta penelitian mengenai pengembangan kawasan cagar budaya di situs sejarah peninggalan kerajaan singosari ini diharapkan nantinya akan muncul arahan pengembangan kawasan cagar budaya Singosari sebagai *Heritage Tourism* sehingga secara tidak langsung dapat memberi dampak positif bagi perkembangan pariwisata di daerah Kabupaten Malang, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang cagar budaya. pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembentukan peraturan daerah

tentang cagar budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa. Perpindahan pusat Ibukota Kabupaten Malang dari Kota Malang ke Kecamatan Kepanjen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 juga menjadi salah satu pendorong pembentukan peraturan daerah ini dalam hal pelestarian dan perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di lokasi eks Ibu kota Kabupaten Malang di Kota Malang yang antara lain berbentuk Pendopo, rumah dinas Bupati, dan lainnya.

Terkait Peran Pemerintah Terhadap Budaya Lokal Dalam Perkembangan Pariwisata. Masih terdapat kekurangan dalam objek cagar Budaya lokal, Pendataan dan penetapan objek cagar budaya di daerah sangat penting untuk mempertahankan keberadaan dan keotentikan sebuah situs warisan sejarah. Seperti rendahnya pengelolaan destinasi serta rendahnya anggaran dan salah satu kekurangan, seperti disitus candy singosari yaitu lahan parkir serta wirausaha yang masih minim, sedangkan di candi sumberawan masih kurangnya fasilitas jalan di areah pariwisata.

Terkait kondisi demikian, di perlukan keseriusan pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan fasilitas cagar budaya lokal sehingga pengunjung yang datang merasa nyaman dan dapat menikmati cagar budaya yang ada, ini merupakan potensi yang sangat bagus untuk di kembangkan dan juga menjaga nilai sejarah, historis serta meningkatkan pendapatan baik pemerintah Kabupaten Malang atau masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan Judul“ Peran Pemerintah Terhadap Budaya Lokal Dalam Perkembangan Pariwisata “ Dalam Penelitian ini peneliti mengkolaborasi Peran Budaya lokal dengan menggunakan teori keberhasilan yang di kemukakan oleh (Blakely, 1989:78-81) dalam Mudrajad Kuncoro (2004:113) bahwa ada 4 indikator dalam mengukur peran pemerintah diantaranya koordinator, fasilitator, stimulator, wirausaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2017 :3-4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Menurut Auerbach and Silverstein dalam Sugiyono (2017 :3), menyatakan bahwa, metode kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasin interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Selanjutnya dia menyatakan bahwa penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis, sedangkan penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis.

Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena budaya lokal masih sangat beragam sehingga berdasarkan jenis penelitian ini peneliti berusaha mendalam infomasi mengenai Peran Pemerintah Terhadap Budaya Lokal Dalam Perkembangan Pariwisata. Lokasi penelitian penting karena lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Fokus penelitian adalah bermanfaat bagi pembatas mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Menurut Sugiyono (2017:207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah

yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada Peran pemerintah terhadap Budaya Lokal Dalam Perkembangan Pariwisata dengan menggunakan grand teori dari Blakely (Dalam Mudrajat Kuncoro 2004) dengan 4 poin Peran keberhasilan meliputi:

1. Koordinator
2. fasilitator
3. Stimulator
4. wirausaha

Dari keempat point diatas dikaji bagaimana Peran Pemerintah terkait program Peran Pemerintah Terhadap Budaya Lokal Dalam Perkembangan Pariwisata dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Peran Pemerintah

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat.

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana Tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya tiap Tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk Sebagian orang. Dalam KBBI mengatakan Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang dikembannya, terdapat factor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (dalam Kustini), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran merupakan perpaduan antara teori,orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi,peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu,dalam hal ini posisi seseorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang

Masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (Sarlito,2015:215). Sedangkan menurut (Raho 2007:67)peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.

Peran sebuah gambaran interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai yang telah ditetapkan,berdasarkan dengan teori ini harapan dari peran menjadi pemahaman bersama yang menuntut individu untuk berperilaku dalam kesehariannya, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter,guru,mahasiswa,orang tua,laki-laki maupun Wanita. Selain itu (Ahmad dan Taylor, 2009: 54) Menyatakan bahwasannya lingkungan organisasi juga dapat mempengaruhi harapan setia individu mengenai perilaku peran mereka, harapan tersebut berupa norma ataupun tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu sehingga individu tersebut akan menerima pesan tersebut serta merespon dengan berbagai cara, namun masalah akan muncul ketika pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan tidak dapat diterima dengan mudah, serta tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan yang akan mengakibatkan pesan tersebut dinilai ambigu dan ketika hal ini terjadi maka individu akan merespon dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan si pengirim pesan.

Menurut Berry (2009: 105) menyebutkan bahwa peran sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seseorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut bisa timbul dari Masyarakat ataupun yang sedang menduduki posisi tersebut. Apabila seseorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang ia miliki berarti ia sedang menjalankan peran.Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang,peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu Masyarakat kepadanya (Siagian 2012:212).

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa peran itu sendiri adalah tindakan kita dalam ikut campur tangan dan terlibat aktif serta penuh dengan tanggung jawab dalam merealisasikan mandat yang diberikan.

Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen dalam (S Fahizal 2019:15) dalam thesisnya mengatakan, bahwa peran juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Fungsi-Fungsi Peran

Menurut Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- 3) Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat dan
- 4) Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Pengertian umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Menurut Sedarmayanti (2004:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang. Menurut Soekanto (2009:243), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi.

Peran menurut Soerjono Soekanto (2009:243) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilaksanakan sehingga keberadaan organisasi atau Lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menjalankan suatu peranan. Di kemudian oleh (Blakely, 1989:78-81) dalam Mudrajat Kuncoro (2004:113) bahwa ada 4 indikator dalam mengukur peran pemerintah diantaranya koordinator, fasilitator, stimulator, wirausaha.

1) Koordinator

Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan. Mencakup peran pemerintah selaku pengkoordinasi dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata.

2) Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang di berdayakan.

3) Stimulator

Menurut Blakely Stimulator adalah pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun objek dan daya Tarik wisata.

4) Wirausaha (*entrepreneur*)

Sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan- tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah lokal dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan menurut Widarta (2005, h.38- 39) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah.

Konsep Budaya Lokal

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini hidup dan dibesarkan dalam budaya tertentu. Demikian pula dalam proses internalisasi budaya. Seseorang bisa mempelajari (diajari) disuruh menjalankan hal-hal yang baik dan menghindari hal yang dianggap buruk karena proses internalisasi dalam budaya masyarakat yang sudah meresap dan menjadi bagian dari hidup seseorang tersebut serta menjadi acuan dalam berpikir dan berperilaku. Sehingga, seseorang akan berperilaku serta bertindak karena pengaruh dari perilaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Misalnya jika ia dibesarkan dalam budaya Jawa maka ia akan bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam budaya tersebut. Seseorang dianggap harus bisa memahami budaya yang ada di sekitarnya, maka dia pun harus bisa mengetahui bagaimana kaidah-kaidah yang ada dalam budaya tersebut. Ketika dia bisa mempelajari kaidah budaya yang ada dalam masyarakat, maka dalam bertindak dan berperilaku pasti akan mengacu pada kaidah budaya yang ada. Begitupula jika ingin mengembangkan potensi budaya lokal peran komunikasi antar budaya harus dapat memahami adat istiadat, norma, yang berlaku dalam budaya tersebut.

Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, karena itu memiliki banyak kekayaan budaya. Budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut J.W. Ajawaila, (2003). Budaya lokal adalah ciri khas budaya suatu kelompok masyarakat lokal. Akan tetapi, tidak mudah untuk merumuskan atau mendefinisikan konsep budaya lokal.

Ada beberapa menurut Para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut:

- a. Superculture, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional.
- b. Culture, lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah atau daerah, contohnya budaya Sunda.
- c. Subculture, merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya gotong royong.
- d. Counter-culture, tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian turunan dari culture, tetapi counter-culture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya individualisme.

Berdasarkan skema sosial budaya yang ada di Indonesia, yang terdiri atas masyarakat yang bersifat majemuk dalam struktur sosial, budaya dan ekonomi, budaya lokal berada pada tingkat culture. Hal ini jika dilihat dari struktur dan tingkatannya.

Abidin (2014) mengatakan bahwa dilihat dari sifat majemuk masyarakat Indonesia, ada 3 golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri, yaitu: kebudayaan suku bangsa/kebudayaan daerah, kebudayaan umum lokal dan kebudayaan nasional. Kebudayaan suku bangsa, artinya sama dengan budaya lokal atau budaya daerah, sedangkan kebudayaan umum lokal bergantung pada aspek ruang, biasanya pada ruang perkotaan ketika berbagai budaya lokal atau daerah yang dibawa oleh setiap pendatang. Akan tetapi, ada budaya dominan yang berkembang, yaitu budaya lokal yang ada di kota atau tempat tersebut, sedangkan kebudayaan nasional adalah akumulasi dari budaya daerah.

Menurut Nawari Ismail (2011), yang dimaksud budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri khas dan atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu.

Pada masa sekarang ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial pemaknaan budaya lokal secara relatif luas amatlah penting, karena kontak antar budaya pasti terjadi sehingga sangat dimungkinkan terjadinya saling akomodasi dan akulturasi budaya. Demikian halnya dengan Desa Margoagung yang bila dilihat dari letak keberadaannya, termasuk desa yang strategis karena terletak di jalur alternatif yang menghubungkan Magelang dan Yogyakarta. Dengan keberadaannya yang strategis, Margoagung menjadi salah satu desa yang ramai dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar sehingga akses transportasi terjangkau. Dengan intensifnya para pengendara yang berlalu lalang melewati desa Margoagung menjadikan kultur dan pemikiran masyarakatnya menjadi lebih beragam.

Berbicara mengenai fungsi budaya lokal, setidaknya ada 4 fungsi menurut Suyanto dalam Ismail (2011) yaitu:

- a. Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi, dan politik. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai upacara slametan yang terus berkembang ditengah deru modernisasi.

- b. Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai norma-norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat.
- c. Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. Misalnya tradisi bersih desa bukan sekedar sebagai kegiatan yang bersifat gotong royong dan lingkungan tetapi juga memiliki makna bersih dosa setiap anggota masyarakat.
- d. Budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, sinoman dan sambutan misalnya memiliki nilai sosialekonomis bagi anggotanya.

Unsur-unsur Budaya Lokal

Guna membahas unsur-unsur budaya lokal, penulis akan mengemukakan pendapat dari beberapa ahli kebudayaan antara lain sebagai berikut:

Melville J. Herskovits dalam Abidin (2014) menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:

- 1) Alat-alat teknologi;
- 2) Sistem ekonomi;
- 3) Sistem keluarga;
- 4) Sistem kekuasaan politik.

Bronislaw Malinowski dalam Abidin (2014) juga mengemukakan ada 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi:

- 1) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antar anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya;
- 2) Organisasi ekonomi;
- 3) Alat-alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama);
- 4) Organisasi kekuatan (politik).

Koentjaraningrat, (1990). berpendapat bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- 1) Bahasa 2) Sistem pengetahuan; 3) Organisasi sosial 4) Sistem peralatan hidup dan teknologi;
- 5) Sistem mata pencaharian hidup; 6) Sistem religi; 7) Kesenian.

Bentuk Budaya Lokal

Wujud kebudayaan adalah rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Menurut J.J. Hoenigman, (1959). wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak.

a. Gagasan (Wujud Ideal) adalah kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak serta tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat menyatakan gagasannya dalam bentuk tulisan, lokasi dari kebudayaan ideal itu berada pada karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

b. Aktivitas (Tindakan) adalah wujud kebudayaan berupa tindakan berpola dari manusia. Wujud ini disebut sistem sosial. Sistem sosial terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan pada adat dan tata kelakuan. Kebudayaan ini bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan.

c. Artefak (Karya) adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan.

1. Kompleks ide-ide, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Benda-benda hasil karya Masyarakat

Konsep Pariwisata

Kata ‘pariwisata’ berasal dari Bahasa sansekerta, yang terdiri atas dua kata yaitu ‘pari’ dan ‘wisata’. ‘pari’ berarti banyak, berkali-kali dan ‘wisata’ berarti perjalanan, berpergian. Atas dasar itu, pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali, dari suatu tempat ketempat lain, dalam Bahasa Inggris disebut “tour”. Pariwisata secara konseptual adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait wisatawan, daerah tujuan, wisata, perjalanan, industri dan sebagainya yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen. Menurut Koen Meyers (2009). Pariwisata merupakan aktifitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang dan tujuan-tujuan lainnya. Sedangkan Kurt Morgenroth dalam Fajri (2016) mengartikan pariwisata sebagai kegiatan meninggalkan tempat asal dengan tujuan menjadi diri sebagai konsumen dari peradaban budaya dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan hidup. Pariwisata sebagai salah satu kegiatan berlibur juga memiliki beberapa tujuan di antaranya :

1. Pariwisata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi agar jeda istirahat yang dimiliki dapat meningkatkan kesehatan jiwa atau ilmu pengetahuan.
2. Pariwisata juga dikembangkan untuk menunjang kegiatan dinas kerja atau bisnis individu atau kelompok

Menurut UUD Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata, termasuk pengusaha objek dan daya Tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

Produk Pariwisata

Kotler (2002) memberi definisi tentang produk pariwisata adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar orang tertarik perhatiannya, ingin memiliki, memanfaatkan dan mengkonsumsi untuk memenuhi keinginan dan mendapat kepuasan. Produk dalam aspek Pariwisata ini termasuk objek fisik, pelayanan, tempat, organisasi dan ide untuk mengembangkan produk pariwisata pada umumnya.

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan aspek-aspek untuk mendukung pengembangan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

1. Aspek Daya Tarik (attraction)

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk pariwisata. Dalam kegiatan berwisata, ada pergerakan manusia dari tempat tinggalnya menuju ke destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, sarana prasarana dan juga masyarakat yang saling terkait untuk melengkapi terwujudnya

kepariwisataan. Setiap destinasi wisata, memiliki daya tarik yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Daerah tujuan wisata untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. Semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka. Selain itu, karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan juga merupakan daya tarik wisata

2. Aspek aksesibilitas (accessibility)

Dalam suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas yang berarti kemudahan untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang diabaikan oleh wisatawan. Dalam pengembangan pariwisata akses yang bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju suatu destinasi merupakan suatu hal yang penting. Aspek fisik yang menyangkut jalan, kelengkapan fasilitas dalam radius tertentu, frekuensi transportasi umum dari terminal terdekat sednagkan untuk akses non fisik ialah suatu kondisi yang tidak bisa dilihat tetapi dapat dirasakan. Aksesibilitas non fisik ini sifatnya lebih kepada layanan. Akses ini bisa kita temui pada ruang-ruang publik yang ada disekitar kita, seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit, supermarket dan lain-lain. Aksesibilitas non fisik juga bisa disebut pola pikir, perilaku dan sebagainya.

3. Fasilitas Dan Pelayanan Wisata (Amenitas)

Disamping daya Tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang dalam perjalanan. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut, perlu disediakanya bermacam-macam fasilitas, mulai dari pemenuhan kebutuhan sejak awal keberangkatan dari tempat tinggal, selama berada di destinasi wisata dan saat kembali ke tempat semula. Komponen fasilitas dan pelayanan perjalanan biasanya terdiri dari unsur transportasi, akomodasi, kuliner dan fasilitas penunjang lainnya yang bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan perjalanan.

4) Elemen Tambahan (Ancillary)

Selain attraction, amenity dan accesbility, produk pariwisata juga memiliki ancillary yang terdiri dari lembaga, sdm, lingkungan, ekonomi, politik, social budaya dan lain-lain yang mendukung dalam kepuasan wisatawan dalam berwisata. Elemen tambahan yang dimaksud adalah kelembagaan atau organisasi yang diperlukan untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk dalam menyusun strategi marketing, program promosi, menentukan kebijakan peraturan perundangan yang berhubungan dengan wisata dan lain-lain.

1. Wisata Budaya di Indonesia

Melakukan wisata budaya bertujuan untuk menambah wawasan serta pandangan hidup seseorang. Dalam wisata budaya, terutama ke luar negeri, kita bisa melihat cara hidup Masyarakat di negara tersebut, mempelajari adat istiadat,kesenian dan kebudayaan mereka. Wisata budaya juga bermanfaat untuk memperkenalkan kebudayaan negeri sendiri ke kancah internasional dan sebaliknya (memberi informasi/membagikan info mengenai kebudayaan dan adat istiadat negeri yang baru saja dikunjungi ke negara kia). Dengan kata lain,melakukan pertukaran seni dan budaya. Seperti, seni musik, seni tari, seni drama.

2. Wisata Bahari

Wisata Bahari dikenal juga dengan sebutan wisata maritima atau wisata tirta. Wisata ini pun berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air, seperti dipantai, danau, teluk. Kegiatan yang biasa dilakukan pada saat melakukan wisata Bahari adalah memancing dan berselancar, berlayar, melakukan lomba balap mendayung, snorkeling, menyelam dan melakukan pemotretan di bawah air. Dalam menyelam, kita bisa melihat betapa indahnya pemandangan dibawah laut. Di Nusantara terdapat pula taman laut yang bisa kita nikmati keindahannya. Potensi wisata Bahari Indonesia antara lain terdapat di kepulauan seribu, Raja Empat, Danau Toba, Mentawai, Pulau Bali, Laut Kepulauan Maluku, dan sebagainya. Sementara untuk negara maritim yang juga mempunyai potensi wisata Bahari seperti Fiji, Hawai, dan Tahiti.

3. Wisata Pertanian

Wisata pertanian merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian, melihat pembibitan di ladang, perkebunan. Biasanya dilakukan dalam rangka studi atau dapat pula hanya sekedar jalan-jalan menikmati hijaunya tanaman dan segarnya udara. Mata akan segar Kembali dengan pemandangan berupa sayuran segar berwarna-warni, melongok bibit aneka sayuran, dan bertualang diperkebunan yang sejuk.

4. Wisata Buru

Wisata buru ini biasa dilakukan di negara yang mempunyai daerah hutan yang dijadikan tempat berburu. Tentunya tidak berburu secara sembarangan. Melainkan mengikuti aturan pemerintah tentang batas wilayah perburuan dan jenis binatang apa saja yang boleh diburu.

5. Wisata Ziarah

Jenis wisata ini berkaitan dengan Sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut oleh Masyarakat setempat. Kebanyakan dilakukan oleh rombongan dari pada perorangan. Tujuannya ketempat suci, maka orang yang dianggap berkuasa atau suci/makam orang besar, pemakaman tokoh terkenal, bukit dan gunung keramat yang sarat legenda, dan sebagainya.

Undang-Undang Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa pembangunan destinasi pariwisata, perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya pedoman yang menjabarkan standar, kriteria, dan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan di jelaskan juga dalam aturan tersebut bahwa memberikan acuan yang komprehensif mengenai pengelolaan destinasi

pariwisata secara berkelanjutan, sehingga terwujud pengelolaan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Serta di dalamnya menekankan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan. Mencakup peran pemerintah selaku pengkoordinasi dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah lokal dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa sekarang ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial pemaknaan budaya lokal secara relatif luas amatlah penting, karena kontak antar budaya pasti terjadi sehingga sangat dimungkinkan terjadinya saling akomodasi dan akulturasi budaya. Demikian halnya dengan Desa Margoagung yang bila dilihat dari letak keberadaannya, termasuk desa yang strategis karena terletak di jalur alternatif yang menghubungkan Magelang dan Yogyakarta. Dengan keberadaannya yang strategis, Margoagung menjadi salah satu desa yang ramai dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar sehingga akses transportasi terjangkau. Dengan intensifnya para pengendara yang berlalu lalang melewati desa Margoagung menjadikan kultur dan pemikiran masyarakatnya menjadi lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Fauziah. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*. Medan : Madenatera.
- Abidin, Saebani. 2014. *Pengantar Sistem Sosial Budaya Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ajawaila, J.W. (2003). *Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, Budaya Nasional dan Budaya Global, dalam Dialog Budaya Wahana Pelesatrian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta : Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ahmad, Z., & Taylor, D. (2009). *Commitment to Independence by Internal Auditors: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict*. *Managerial Auditing Journal*, Vol 3, No. 9.
- Berry, D. (2009). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Cohen, Bruce J 1992. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fajri, K, dan Riyanto E.S, N. 2016. *Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Bandung Dalam Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisatawan Asal Malaysia*. *Tourism Scientific Journal*, 1(2), 167
- Honigmann, J.J. 1959. *The World of Man Dalam Pengantar Ilmu Antropologi*. Koentjaraningrat (Peny) 1981. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, P. (2002). *Manajemen pemasaran, Edisi Melinium*. Jakarta : PT. Prehilindo.
- Meyers, Koen. 2009. *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Jakarta: Unesco Office.
- Nizar, Muhamad Afdi, 2011. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*. Vol. 6. No. 2. ISSN 1907- 9419. p. 195-211.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi I. Cetakan Ketiga Belas. Bumi aksara. Bumi Aksara. Jakarta.

- Suyanto, Ph.D. 2010. *Model Pembinaan Pendidikan Karakter Di Lingkungan Sekolah*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Government (Pemerintahan yang baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Spillane, J. 1993. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Ranjabar, Jakobus, 2006. *Sistem Sosial budaya Indonesia Suatu Pengantar*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Widarta. 2005. *Pokok-pokok pemerintah Daerah*. Bantul : Pondok Edukasi
- UUD Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata*,
Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang cagar budaya..